

Lakukan Rasionalisasi Anggaran KUA-PPAS Disepakati Rp4,9 Triliun, Lebih Rendah dari Tahun Lalu



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,24/07/2024

SAMARINDA – Jajaran pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang dalam perencanaan belanja di 2025 mendatang.

Pasalnya dalam agenda kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, antara eksekutif dan legislatif di ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Senin (22/7), APBD Samarinda 2025 berada di angka Rp4,9 triliun. Merosot Rp200 miliar dari APBD 2024 yang tahun lalu disepakati Rp5,1 triliun.

Terkait kondisi tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut bahwa kondisi keuangan Pemkot saat ini sehat. Pengurangan itu disebutnya bukan defisit tetapi rasionalisasi anggaran.

“Supaya tidak defisit, tidak ada hutang. Justru itu harus dilakukan dalam rangka tata kelola keuangan yang baik,” ucapnya, Senin (22/7).

Di samping itu, alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu yang diplot Rp1,5 triliun rupanya tidak mencapai angka tersebut.

Hal ini dipengaruhi beberapa faktor misalnya ketika dalam penyusunan anggaran, beberapa OPD diproyeksi tidak bisa menyelesaikan proyek secara 100 persen, maka asumsi itu dicatatkan dalam SiLPA pada tahun berjalan.

“Ternyata dengan intervensi Pemkot, proyek tersebut bisa selesai sehingga dananya terserap atau yang tadinya masuk SiLPA ternyata terserap, namun karena terlanjur masuk SiLPA,” ucapnya.

Sehingga agar tidak terhitung defisit dalam penyusunan APBD 2025, sebagaimana tertuang dalam KUA-PPAS, dilakukan penyesuaian atau rasionalisasi itu. Dia menilai langkah ini dalam rangka tata kelola keuangan yang baik. “Agar tidak ada hutang,” singkatnya.

Dia menjelaskan, penyesuaian itu membuat tiap OPD turut mengencangkan ikat pinggang dengan persentase rata-rata 8 persen dari kegiatan yang direncanakan. Namun dipastikan belanja utama tidak terganggu, hanya belanja rutin yang bisa ditekan seperti perjalanan dinas dan lainnya.

“Kas (daerah) itu sangat sehat. Di atas Rp800 miliar. Ini masalah pencatatan, karena APBD mengandung sistem akuntansinya harus seimbang,” jelasnya.

Pihaknya optimistis, bahwa pendapatan di 2025 bisa menyamai bahkan melampaui APBD-P 2024 ini, di mana proyeksinya berkisar di Rp5,6 triliun, lebih rendah Rp100 miliar dari proyeksi belanja di 2024, yakni Rp5,7 triliun. “Kenapa murninya kecil, karena belum masuk perubahan. Mudahan pendapatan di APBD-P 2025 minimal sama lah,” tegasnya.

Untuk memenuhi hal itu, pihaknya akan terus menggali berbagai potensi pendapatan khususnya dari dana transfer, Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa penentuan angka Rp4,9 triliun itu merupakan bentuk target optimisme yang akan dicapai. “Tapi biasanya target pasti terlampaui,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Lakukan Rasionalisasi Anggaran KUA-PPAS Disepakati Rp4,9 Triliun, Lebih Rendah dari Tahun Lalu, 24/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam Pasal 23 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
 - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
 - (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Pasal 83 ayat (3) PP 12/2019 diatur bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.